

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Dasar Pemikiran

Kota Depok saat ini mempunyai luas wilayah sekitar 200, 29 kilometer persegi.<sup>1</sup> Kota yang diapit dua kota besar Jakarta dan Bogor mengalami perjalanan yang mungkin jarang dilalui oleh kota lain di Indonesia. Pernah menjadi tanah milik seorang pejabat VOC, lalu menjadi daerah mandiri pada masa kolonial, terakhir menjadi bagian dari Indonesia seutuhnya. Suatu daerah sangat menarik untuk ditelusuri, karna kita akan menemui hal yang berbeda dari daerah tersebut. Setiap daerah tentunya memiliki keunikan tersendiri, baik dilihat dari letak geografis, penduduk maupun sejarahnya.

Sejatinya, sejarah kota muncul ketika statusnya ditetapkan sebagai milik seorang pejabat tinggi.<sup>2</sup> Sehingga dapat dikatakan sejarah Depok dimulai pada abad ke- 17 ketika tanah Depok dimiliki oleh seorang pejabat tinggi VOC, Cornelis Chastelein. Pada tanggal 18 Mei 1696 Cornelis Chastelein membeli tanah Depok dari Lucas van der Meur dengan harga 700 rijksdaalder, yang meliputi Depok, tanah Mampang dan Karang Anyar, luas 1.244 ha.<sup>3</sup> Memang pada saat pemerintahan Deandles, adalah seorang politikus Belanda yang merupakan

---

<sup>1</sup> Yano Jonathans, *Depok Tempo Doeloe*, (Jakarta: Libri, 2011), hlm. 2.

<sup>2</sup> Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Kencana, 2003), hlm. 51.

<sup>3</sup> Tuti Setiawati, *Depok Pada Masa Pendudukan Jepang hingga Awal Kemerdekaan: Prosiding Seminar Penelusuran Arsip Sejarah Bebas Waktu* (Depok: Arsip dan Perputakaan Pemkot Depok, 2015), hlm. 34.

Gubernur-Jenderal Hindia-Belanda yang ke-36. Ia memerintah antara tahun 1808 – 1811, banyak tanah di pulau Jawa dijual kepada swasta (partikelir).

Cornelis Chastelein bukan hanya membawa keluarganya melainkan turut serta membawa budak – budaknya. Para budak yang dipindahkan ke Depok, berasal dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain, dari Bali, Sulawesi, dan Timor, yang jumlahnya sekitar 150 orang.<sup>4</sup> Chastelein beranggapan bahwa perbudakan akan menyebabkan ketidakpuasan struktural di antara penduduk, sehingga ia menyarankan otonomi yang lebih besar. Untuk itu, ia sangat memohon kemandirian yang lebih besar diberikan kepada para penduduk.<sup>5</sup> Buah pikiran Chastelein yang dimaksud adalah sebuah komunitas yang memiliki bentuk pemerintahan. Suatu komunitas tidak akan hidup tanpa dibentuk suatu Pemerintahan. Pemerintah yang dimaksud agar dapat memutuskan sendiri semua perkara rumah tangga, semisal, sengketa yang mungkin timbul diantara para penduduk atau dengan masyarakat kampung sekitar.

Kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang menjadi keharusan bagi proses kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Pemerintahan adalah sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara, yang terjadi dari cabang – cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial atau alat – alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan Pemerintah juga dapat diartikan dalam arti

---

<sup>4</sup> Tri Wahyuningsih M Irsyam, *Berkembang dalam Bayang – Bayang Jakarta: Sejarah Depok 1950-1990* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 41.

<sup>5</sup> Jan-Karel B.H. Kwisthout, *Jejak – Jejak Masa Lalu Depok* (Jakarta: Gunung Mulia, 2015), hlm. 60.

sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksanaan eksekutif atau secara lebih penting, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara.<sup>6</sup> Maka sederhananya pemerintahan adalah pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan Pemerintah adalah organ/alat atau alat yang menjalankan pemerintahan. Dalam hal ini Depok dapat dikategorikan sebagai pemerintahan dalam arti sempit. Yakni pemerintahan terbatas yang mengurus segala hal tentang Tanah Depok beserta masyarakatnya. Belum dapat dikategorikan sebagai pemerintahan dalam arti luas, karena hanya memenuhi unsur kekuasaan eksekutif saja, yakni menjalankan pemerintahan dengan jabatan president, sekretaris, kassier dan komitteer.

Dalam perkembangan kemudian, hingga akhir abad ke-19, hak guna atas tanah Depok secara resmi terus berlaku. Tahun 1871 tatanan *Gemeente Bestuur* Depok mulai disusun oleh seorang advocaat dari Batavia, Mr.M.H. Klein dengan konsep *reglement* yang berisikan pembentukan organisasi dan pimpinan desa atau St desa *zelfbestuur* yang pengaturannya bercorak “republik”. Dengan demikian Depok memiliki pemerintahan terbatas yang mengurus segala hal yang terkait dengan Tanah Depok dan masyarakatnya. Dengan merujuk pada suatu badan yang tugasnya mengurus kepentingan komunitas dari tanah partikelir itu, yakni *Gemeente Bestuur*. Pemerintahan ini nantinya akan berganti setiap tiga tahun di pilih oleh masyarakatnya, yakni keturunan 150 budak Chastelein, berdasarkan *reglement* yang telah di tetapkan. Bahkan pada masa ini dapat dikatakan Depok

---

<sup>6</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2001), Hlm. 101.

mencapai tingkat kesejahteraan dibanding dengan daerah sekitar. Kesejahteraan yang dimaksud adalah tingkat kemampuan memenuhi kebutuhan pokok.

Pada masa pendudukan Jepang, dapat dikatakan Pemerintahan Depok tidak mengalami pergolakan yang berarti seperti halnya kota – kota vital di wilayah Indonesia. Mungkin disebabkan tidak begitu banyaknya personil yang ditempatkan di daerah pendudukan, dan perlu biaya yang cukup besar untuk mendatangkannya. Para pegawai dan semua penduduk harus mulai bekerja kembali seperti biasa,<sup>7</sup> hal ini kiranya yang menyebabkan tidak terjadinya pergolakan berarti di masa pendudukan Jepang. Depok pun diyakini mengalami perlakuan yang sama dengan daerah lainnya di Indonesia, yakni tak lepas dari tekanan saat pendudukan Jepang. Karena sesuai dengan tujuan awal pendudukan Jepang untuk mengeksploitasi segala sumber daya yang ada demi menunjang tercapainya kemenangan Jepang dalam perang Asia Timur Raya<sup>8</sup>.

Situasi di politik Depok mulai bergolak setelah Soekarno memproklamkan kemerdekaan Indonesia pada hari Jumat, 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta Pusat.<sup>9</sup> Tidak sedikit bekas aktivis pergerakan kebangsaan di tingkat lokal, atau mantan aktivis tingkat nasional yang bergerak di tingkat lokal yang kemudian mengendalikan situasi di daerah – daerahnya. Di Depok, Tole Iskandar membentuk laskar 21.<sup>10</sup> Didasarkan atas jumlah pasukan yang dipimpin oleh Tole Iskandar. Serta banyak lagi bermunculan laskar – laskar rakyat yang berbalut

---

<sup>7</sup> Arifin Bey, *Pendudukan Jepang di Indonesia: Suatu Ungkapan Berdasarkan Dokumentasi Pemerintahan Belanda* (Jakarta: Kesaint Blanc, 1987), hlm. 9.

<sup>8</sup> Susanto Zuhdi, *Bogor Zaman Jepang (1942-1945)* (Depok: Komunitas Bambu, 2017), hlm. 9

<sup>9</sup> Wenri Wanhar, *Gedoran Depok: Revolusi Sosial di Tepi Jakarta 1945-1955* (Depok: Sadar Media, 2011), hlm. 75.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 78.

semangat Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Kentalnya nuansa Belanda pada diri eks kaum budak Chastelein, itu membuat seolah Pemerintahan Depok yang telah berdiri tidak direstui. Puncaknya ketika terjadi gerakan revolusi sosial karna ketimpangan yang terjadi antara Orang Depok dengan Masyarakat sekitar. Segerombolan massa mengepung Depok, orang – orang yang dianggap pro Belanda serta kaum Indo Belanda menjadi sasaran kebencian orang – orang Republik.

Semangat Revolusi semakin bulat setelah Belanda (NICA) bersama sekutunya datang ke Indonesia dengan dalih mengamankan wilayah Indonesia yang mengalami keterpurukan setelah masa pendudukan Jepang. Kehadiran Belanda dan sekutunya tentu ditolak bangsa Indonesia pada umumnya. Sikap antipati bangsa Indonesia memaksa Belanda dan sekutunya melakukan tindakan – tindakan provokasi dan terror terhadap penduduk pro Republik Indonesia. Antipasti terhadap segala sesuatu berbau Belanda dan kroninya telah melekat pada pola pikir bangsa Indonesia, sehingga perlawanan terhadap NICA pun dilancarkan baik oleh masyarakat umum maupun angkatan bersenjata. Kabar rencana kedatangan pasukan NICA sampai ketelinga para pejuang kemerdekaan, tentunya mereka tidak akan tinggal diam. Kendati dihadang di berbagai titik utama akses masuk Depok, tak disangka tak diduga, pasukan NICA tiba – tiba sudah ada didalam wilayah Depok, pertempuran pun tak terelakkan.<sup>11</sup> Kekalahan dalam persenjataan menyebabkan pasukan pemuda yang menjaga Depok terpaksa mundur dari pertempuran. Maka Depok dapat dikuasai oleh NICA dan sekutunya.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 110.

Di masa – masa revolusi kemerdekaan ini sebenarnya pasukan NICA dan sekutu menginternir para tawanan termasuk di dalamnya orang – orang Depok diminta memilih ikut Republik Indonesia atau Belanda. Hal ini mungkin terjadi karena adanya beberapa perundingan damai yang tercapai semasa agresi militer Belanda seperti perundingan Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Roem-Roijen dan terakhir Konferensi Meja Bundar. Namun, tidak semua orang Depok ini bersedia di internir, sebagian memilih tetap tinggal di tanah Depok yang kiranya sudah dianggap sebagai tanah kelahiran mereka.

Ketika akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949, maka kebebasan Depok pun akhirnya usai. Depok yang selama ini dipimpin seorang “Presiden” harus berakhir ketika Pemerintah Indonesia pada tanggal 8 April 1949 mengeluarkan keputusan tentang penghapusan tanah – tanah partikelir di seluruh Indonesia dan memberlakukan *landreform* (Undang – Undang Agraria).<sup>12</sup> Dengan demikian orang – orang Depok yang tetap memilih tinggal di tanah leluhurnya tunduk akan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Namun, ada perlakuan pengecualian dari likuidasi yaitu asset yang bersifat *Communal bezit* (kepemilikan bersama) yaitu: Balai Gemeente, Sekolah, Gereja, Pastori, Balai Pertemuan, Tanah Makam, Tanah Zending & 5 bangunan milik Simon Loen di Kampung Lio.<sup>13</sup> Dalam perjalanannya Depok akan mendapatkan hak administratifnya sebagai sebuah kota di Provinsi Jawa Barat yang menjadi satelit kota besar Jakarta dan Bogor. Depok mengalami perjalanannya yang unik dari tanah

---

<sup>12</sup>Tri Wahyuningsih M. Irsyam, *op. cit.*, hlm. 42.

<sup>13</sup>Tuti Setiawati, *op. cit.*, hlm. 44.

dengan status *eigendom* dengan hak tanah partikelirnya menuju tanah Negara semenjak dikeluarkannya keputusan penghapusan tanah partikelir. Terjadinya suatu peristiwa di daerah – daerah di Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan merupakan bagian perjuangan bangsa Indonesia yang integral demi tercapainya kemerdekaan Indonesia yang utuh.

Berdasarkan penjelasan tersebut akhirnya penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul “Perubahan Pemerintahan Depok Pada Masa Pendudukan Jepang Hingga Awal Kemerdekaan RI (1942-1952)”

Alasan penulis memilih judul tersebut karena menulis sejarah daerah barangkali masih rendah tingkat ketertarikan akan hal tersebut, memang tidak dipungkiri sumber – sumber sulit ditemukan jika kita ingin melihat sejarah melalui perspektif daerah. Namun, menurut penulis sendiri perlu di perhatikan sejarah daerah sebagai penunjang agar tercipta sejarah Nasional yang lebih luas dan lengkap. Maka hal ini yang menyebabkan penulis tertarik akan sejarah daerah Depok.

Alasan lain adalah penulis memiliki kedekatan emosional dengan Depok sebagai tanah kelahiran penulis. Maka izinkan penulis mendedikasikan sedikit waktunya untuk meneliti kota tempat penulis lahir, tumbuh dan berkembang.

Penelitian yang relevan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang sudah dilakukan oleh Mega Trianasari yang berjudul “Peristiwa Gedoran: Revolusi Sosial Di Tanah Partikelir Depok Pada Oktober 1945”

Persamaan penelitian Mega Trianasari dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama – sama terkait dengan Kota Depok. Pembedanya adalah

penelitian penulis lebih berfokus pada kondisi politik yang membuat perubahan dalam pemerintahan Depok. Bersifat lebih umum seputar dinamika atau perubahan dalam pemerintahan Depok sejak awal berdiri hingga kemerdekaan RI jika dibandingkan dengan penelitian Mega Trianasari yang lebih khusus seputar revolusi sosial.

## **B. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah**

Titik berat penulisan skripsi “Perubahan Pemerintahan Depok Pada Masa Pendudukan Jepang Hingga Awal Kemerdekaan RI (1942-1952)” berdasarkan penjelasan pada dasar pemikiran di atas, adalah mendeskripsikan dinamika Pemerintahan Depok. Tentunya dengan batasan Spasial yang pasti Kota Depok. Depok yang dimaksud disini adalah Tanah bekas kepunyaan Chastelein dari awal terbentuknya pemerintahan hingga awal kemerdekaan Republik Indonesia. Dan juga batasan Temporal, tahun 1942 di pilih karena awal pendudukan Jepang atas pergantian masa kolonial dan sebagai awal perubahan besar pada kondisi Politik Depok. Sedangkan tahun 1952 dipilih karena di anggap pemerintahan yang sebelumnya mandiri mengatasi segala persoalan masyarakatnya resmi dihapus sebagai tanah Partikelir dan Depok tergabung dalam pemerintahan Republik Indonesia.

Pokok permasalahan tersebut sesungguhnya telah memunculkan berbagai macam permasalahan dan pertanyaan, namun atas dasar pertimbangan efektifitas dan efisiensi, maka peneliti merumuskan dan memfokuskan pada empat pertanyaan mendasar, yaitu:



1. Bagaimana awal mula terbentuknya Pemerintahan di Depok?
2. Bagaimana sistem Pemerintahan Depok pada masa Kolonial Belanda?
3. Bagaimana sistem Pemerintahan Depok pada masa pendudukan Jepang hingga awal Kemerdekaan RI?
4. Bagaimana proses perubahan Pemerintahan Depok pada awal kemerdekaan RI?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dinamika dalam pemerintahan Depok sejak awal berdiri hingga awal kemerdekaan Republik Indonesia.

Kegunaan penelitian ini secara teoritik diharapkan mampu memberi tambahan pengetahuan ilmiah yang berguna dalam pengembangan ilmu sejarah khususnya yang berkaitan dengan dinamika dalam pemerintahan Depok sejak awal berdiri hingga masa awal kemerdekaan Republik Indonesia 1714-1949. Menambah khasanah pustaka mengenai Sejarah Kota Depok dan juga memberikan sumbangan wawasan ilmu pengetahuan atau setidaknya informasi tentang dinamika pemerintahan Depok.

### **D. Metode dan Sumber Penelitian**

#### **1. Metode Penelitian**

Louis Gottschalk memaknai metode sejarah sebagai proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman, dokumen – dokumen, dan peninggalan masa

lampau yang otentik dan dapat dipercaya, serta membuat interpretasi dan sintesis atas fakta-fakta tersebut menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya.<sup>14</sup> Maka agar penulisan ini mencapai hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode sejarah dimana mengikuti prosedur dan kaidah – kaidah yang berlaku dalam penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah yang biasanya digunakan oleh para sejarawan tersusun dalam empat langkah, yaitu: *heuristik*, *verifikasi/kritik*, *interpretasi*, dan *penulisan*.<sup>15</sup> Dalam penulisannya menggunakan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu sebagai salah satu metodenya. Oleh karena itu, hasil penelitian ditulis secara deskriptif-naratif.

Berkaitan dengan langkah-langkah penelitian, pada tahap pertama yang peneliti lakukan adalah mencari dan mengumpulkan data atau sumber-sumber baik sumber primer maupun sumber sekunder, yang terkait dan memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian yang telah dikemukakan. Kajian pustaka yang peneliti gunakan didapat dari berbagai tempat seperti Arsip Nasional Indonesia, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan dan Arsip Daerah Depok, Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein, dan koleksi pribadi milik penulis.

Tahap kedua, yang penulis lakukan adalah memverifikasi atau mengkritik sumber – sumber yang telah didapatkan. Pada tahap ini dilakukan dua cara, yaitu melakukan kritik ekstern dan kritik intern untuk menguji kredibilitas dari sumber-sumber yang didapatkan. Dalam kritik ekstern, dilakukan uji atas keaslian atau

---

<sup>14</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, Terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975), hlm. 18.

<sup>15</sup> A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Omabak, 2012), hlm. 28.

otentitas sumber yang meliputi tanggal, pengarang, melihat bahan material seperti tulisan atau ketikan dan bahasa yang digunakan. Sedangkan untuk kritik intern, penulis melakukan uji analisis terhadap kredibilitas teks dan terbitan melalui isi sumber atau dokumen.

Tahap ketiga, peneliti melakukan interpretasi atau menafsirkan fakta-fakta historis dari sumber sejarah yang telah diverifikasi sebelumnya, sehingga nantinya dapat digunakan untuk menulis sejarah mengenai dinamika Pemerintahan Depok. Tahapan ini menuntut kehati – hatian dan integritas penulis untuk menghindari interpretasi yang subjektif terhadap fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, agar ditemukan kesimpulan atau gambaran sejarah yang ilmiah. Berbekal pada satu fakta sejarah disinilah tempat saya selaku penulis melakukan interpretasi dengan sangat berhati-hati dan seobyektifitas mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan setiap kebenarannya, kemudian dilakukan analisis terhadap fakta-fakta tersebut, dan ditulis dalam bentuk Penelitian.

Tahap terakhir adalah tahap historiografi atau penulisan sejarah. Model penulisan ini adalah deskriptif-naratif yang berarti penulis mendeskripsikan secara logis dan sistematis fakta yang telah diolah ke dalam bentuk tulisan.

## 2. Sumber Penelitian

Sumber penelitian yang peneliti pakai adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer peneliti dapatkan dari dokumen – dokumen atau arsip – arsip yang memuat serta bersinggungan tentang Pemerintahan Depok seperti *Reglement van het Land Depok* (Buitenzorg, 1913) bisa dikatakan sebagai sumber

primer karena se zaman sewaktu wilayah Depok mempunyai suatu pemerintahan mandiri dan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah – Tanah Partikelir sebagai sumber berakhirnya seluruh tanah Partikelir di Indonesia termasuk tanah Depok. Serta buku *Gedoran Depok: Revolusi Sosial di Tepi Jakarta 1945-1955* (Wenri Wanhar), *Potret Kehidupan Sosial & Budaya Masyarakat Depok Tempo Doeloe* (Yano Jonathans), *Depok* (Ronald Jonathans), *Jejak – Jejak Masa Lalu Depok* (Jan-Karel Kwisthout), tidak lupa pula beberapa wawancara terhadap tokoh keturunan asli dari 12 marga Depok bekas budak Chastelein serta sumber lain yang menjadi sumber sekunder secara jelas dapat merekontruksi perjalanan Pemerintahan Depok dari masa ke masa yang ditemukan di Arsip dan Perpustakaan Nasional Indonesia maupun data dari Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein.

